

ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN
KEUANGAN BERBASIS KAS MENUJU
AKRUAL DI DESA ONOZITOLI
SIFAOROASI KECAMATAN
GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNG SITOLI
By MEI CAHYANTI TELAUMBANUA

5
ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN KEUANGAN
BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DI DESA ONOZITOLI
SIFAOROASI KECAMATAN GUNUNGSITOLI
KOTA GUNUNG SITOLI

TUGAS AKHIR



Oleh :
MEI CAHYANTI TELAUMBANUA
NIM. 2121016

8
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2024

5
ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN KEUANGAN
BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DI DESA ONOZITOLI
SIFAOROASI KECAMATAN GUNUNGSITOLI
KOTA GUNUNG SITOLI

TUGAS AKHIR

32
Diajukan Kepada:
Universitas Nias

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan
Program Diploma Akuntansi

Oleh
MEI CAHYANTI TELAUMBANUA
NIM 2121016

56
PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2024

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Komparatif Laporan Keuangan Berbasis Kas
Menuju Akrua Di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan
Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

Nama : MEI CAHYANTI TELAUMBANUA

NIM : 2121016

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing,

Serniati Zebua, S.,E M.Si
NIDN 0103098702

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Dekan,

Serniati Zebua, S.E., M.Si
NIDN 0103098702

Maria M. Bate'e, S.E., M.M
NIDN 0111038208

PENGESAHAN PEMBIMBING

Tugas akhir ⁵ dengan judul analisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual di desa onozitoli sifaoroasi kecamatan gunungsitoli kota gunung sitoli yang disusun oleh Mei Cahyanti Telaumbanua dengan NIM 2121016 Program Studi Akuntansi telah dikoreksi dan revisi oleh pembimbing, sehingga dapat diajukan untuk sidang ujian tugas akhir.

Gunungsitoli, Agustus 2024
Dosen Pembimbing

Serniati Zebua, S.,E M.Si
NIDN. 0125128605



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI NIAS
UNIVERSITAS NIAS
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Jalan Karet No. 30 Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Homepage: <https://mnj.unias.ac.id> email: mnj@unias.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mei Cahyanti Tel
NIM : 2121016
Program : Diploma
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

15
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- (1) Tugas Akhir yang saya diujikan adalah benar-benar pekerjaan saya sendiri (bukan jiblanan) dan belum pernah dipergunakan atau dipublikasikan untuk keperluan lain oleh siapapun juga;
- (2) Semua sumber yang saya gunakan telah saya cantumkan sebagaimana semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti/dapat dibuktikan bahwa Tugas akhir ini hasil jiblanan, maka saya menanggung risiko diperkarakan oleh Universitas Nias.

64
Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Gunungsitoli, Agustus 2024

Yang Menyatakan

Mei Cahyanti Telaumbanua

NIM. 2121008

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan anugrah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan BUMDes Di Desa Simae’asi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat” ini dapat di selesaikan semata-mata karena belas kasih Allah yang maha penyayang kepada penulis. Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa rapungnya penyusunan tugas akhir ini, bukanlah semata-mata kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerjasama, motivasi, dukungan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulisan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulisan.

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si. selaku Rektor Universitas Nias.
2. Ibu Serniati Zebua, S.E.,M.Si. sebagai Dosen Pembimbing.
3. Ibu Serniati Zebua, S.E.,M.Si. sebagai ketua program studi D-III Akuntansi.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Universitas Nias atas semua ilmu yang telah di berikan kepada penulis.
5. Kepala Desa dan aparat desa seluruh masyarakat Desa onozitoli sifaoroasi kecamatan gununngsitoli kota gunungsitoli karena telah mengizinkan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Hanya Doa yang dapat penulis berikan atas bantuan dan dukungannya. Kiranya kasih tuhan selalu menyertai dan memberkati kita.

Gunungsitoli, Agustus 2024

Penulis,

MEI CAHYANTI TEL

NIM 2121016

BAB I

PENDAHULUAN

3 1.1 Latar belakang

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat, maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung dan program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan, karena desa salah satu wilayah yang domain dalam memajukan Indonesia serta peraturan di desa sesuai dengan kewenangannya untuk mendorong agar dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Masyarakat Onozitoli menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam konsep akuntansi berbasis akrual yang memerlukan pelatihan dan pendidikan tambahan bagi banyak anggotanya. Selain itu, sumber daya yang terbatas, baik dalam hal finansial maupun tenaga kerja, membuat implementasi sistem ini menjadi lebih sulit. Keterbatasan dalam akses teknologi dan infrastruktur juga menjadi hambatan signifikan, karena akuntansi berbasis akrual sering kali memerlukan sistem dan perangkat lunak yang lebih canggih dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Perubahan budaya dan kebiasaan kerja yang diperlukan untuk beralih dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual juga memerlukan waktu dan adaptasi. Di sisi lain, regulasi dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah dan otoritas lokal sangat penting untuk memastikan penerapan yang konsisten dan efektif. Keberlanjutan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk dukungan dari pemimpin masyarakat dan individu, juga merupakan faktor kunci untuk sukses dalam jangka panjang.

Masyarakat di Desa Onozitoli Sifaoroasi sebelumnya menggunakan basis kas dalam pencatatan akuntansi mereka, yang lebih sederhana dan hanya mencatat transaksi saat kas benar-benar diterima atau dibayar. Namun, dengan transisi menuju akuntansi berbasis akrual, di mana transaksi dicatat saat terjadi, baik kas sudah diterima atau belum, muncul berbagai permasalahan. Salah satu perbedaan utama antara kedua basis ini adalah transparansi dan akurasi laporan keuangan. Basis kas tidak mencerminkan kewajiban dan piutang yang belum direalisasikan,

sehingga kurang memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan. Sementara itu, basis akrual menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dengan mencatat semua aset dan kewajiban. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan akuntansi berbasis akrual, keterbatasan sistem dan infrastruktur pencatatan yang memadai, serta sumber daya manusia yang terbatas. Penelitian ini menarik untuk dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, serta membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan penyusunan perencanaan pembangunan desa serta pelaksanaan secara mandiri. Pemerintah desa diharapkan secara mandiri untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan (Putri 2019).

Menurut (Indonesia 2014) pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Sesuai ketentuan perundangan yang telah ditetapkan, menurut UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 24 Tahun 2005. PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah pemerintah berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang terdiri dari laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan, dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintahan desa sering menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka secara efektif, terutama dengan sistem anggaran tradisional yang berbasis kas yang kurang memadai untuk mengelola kebutuhan yang semakin kompleks dan transparan. Adopsi akuntansi berbasis akrual muncul sebagai respons terhadap tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dana publik. Ini membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan desa serta memperbaiki kemampuan dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis. Persyaratan peraturan dan standar akuntansi, termasuk pengaruh dari inisiatif internasional seperti IPSAS, juga dapat mempengaruhi kebijakan nasional tentang adopsi akuntansi berbasis akrual di tingkat desa. Meskipun transisi ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan, manfaat jangka panjangnya mencakup peningkatan transparansi, potensi penghematan biaya, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan desa

Desa Onozitoli Sifaoroasi. Desa ini terletak di wilayah pedalaman yang subur dengan topografi berbukit, dikelilingi oleh hamparan perkebunan milik warga desa. Onozitoli Sifaoroasi memiliki populasi sekitar kurang lebih 1500 penduduk yang mayoritas menggantungkan hidup dari pertanian, terutama tanaman padi, jagung, dan sayuran. Desa ini memiliki infrastruktur dasar yang terbatas, dengan akses jalan utama yang menghubungkan desa dengan desa terdekat yang lebih bagus, serta jaringan listrik yang telah mencakup sebagian besar desa tersebut.

Masyarakat Desa Onozitoli Sifaoroasi dikenal akan keramahan dan kebersamaannya, Meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan infrastruktur, semangat gotong royong dan kebersamaan tetap menjadi pendorong utama untuk kemajuan desa kedepan.

³ Akuntansi Pemerintahan tidak berbeda dengan Akuntansi Umum. Akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi yaitu analisis transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, dan laporan keuangan.

³ Akuntansi secara umum, merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Laporan yang dihasilkan berupa laporan keuangan dan tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas, yang memiliki manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

³⁸ 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah pada penelitian yang telah dikemukakan, masalah permasalahan pokok yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu “Bagaimana menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual?”⁴¹

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual.⁷²

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Desa

³ Manfaat penelitian bagi Desa Onozitoli Sifaoroasi yaitu mengetahui manfaat dari penerapan akuntansi Desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Onozitoli Sifaoroasi sebagai desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.

-Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi di Pemerintahan Desa Onozitoli Sifaoroasi.³

Bagi Pembaca

¹⁵ Manfaat bagi pembaca yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat tugas akhir yang sejenis.

30

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam kerangka penelitian ini, penulis menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual. Data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan Kepala desa, dan bendahara.

1.5.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Desa Onozitoli Sifaoroasi kecamatan Gunungsitoli

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam menyusun penulisan adalah sebagai berikut:

- 1 Melakukan pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi untuk menganalisa sistem secara umum dan yang digunakan atau sedang berjalan dalam perusahaan serta mempelajari cara-cara membangun sistem yang baik untuk digunakan dalam perusahaan.
- 2 Melakukan wawancara dengan kepala Desa, bendahara desa, untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi secara kompleks serta proses sistem yang sedang berjalan atau digunakan.

1.5.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif dalam proses analisis kualitatif yakni pendekatan menganalisis yang merinci dan menguraikan berbagai informasi yang menjadi suatu objek penelitian. tanpa melibatkan perhitungan statistik maupun data numerik. pendekatan ini melibatkan perbandingan antara fakta yang ada dengan teori yang berlaku pada Desa Onozitoli Sifaoroasi

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi pemerintah

2.1.1 Akuntansi Pemerintah

Secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor swasta dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan alat analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan NNGI depar dana masyarakat di Negara dan dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek proyek kerjasama sektor publik dan swasta Karakteristik Akuntansi Sektor Publik yakni (Lestari Niu, Karamoy, dan Tangkuman, 2014):

1. Pemerintah tidak berorientasi pada laba
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti gedung dan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba ditahan di neraca.

Akuntansi sektor publik dibedakan atas Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Sosial. Menurut Nordiawan, Putradan Rahmawati (2012:4) dalam (Tulangow dan Ilat 2014) menjelaskan Akuntansi Pemerintah mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi- transaksi yang terjadi di Badan Pemerintah. Ghozali dan Ratmono (2008:3) menyatakan bahwa dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk membenkan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang menyangkut organisasi pemerintah dan organisasi- organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (non-profit organization). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam di seluruh pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintah menggunakan beberapa basis akuntansi yaitu dimulai dari basis kas, dilanjutkan dengan basis kas menuju akrual dan basis akrual (GOOD 2015).

2.2 Berbasis Akrual

2.2.1 Definisi berbasis akrual

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:11) dalam (Alwie dkk. 2020), Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Menurut Jan Hocsada (2015:78), Basis Akrual merupakan basis akuntansi yang pendapatan diakui saat dihasilkan tanpa perlu memperhatikan penerimaan kas (dapat lebih dahulu, atau arus kas masuk tunai, atau belakangan atau pendapatan kredit), dan beban diakui saat terjadinya beban tanpa perlu memerhatikan pembayarannya (dibayar dimuka, biaya saat tunai, atau biaya timbul walau belum dibayar).

Halim dan Kusufi (2012: 53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan Beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain Bastian (2010:120)

1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan talat historis dan sulansa
3. Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

Basis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas dalam memberikan data yang lebih akurat. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas.

2.2.2 Tujuan Penggunaan basis akrual

Tujuan dari penggunaan basis akrual yaitu (a) meningkatkan efisiensi dan efektifitas, (b) meningkatkan pengendalian fiscal, manajemen aset, (c) meningkatkan akuntabilitas penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah, (d) informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, (e) mereformasi sistem anggaran belanja, (f) transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. (Margareta, 2015) SE

1

2.2.3 Manfaat Basis Akrual

Manfaat dari penggunaan basis akrual (a) Gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah; (b) Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah (c)

Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya. (d) Standar yang dapat diterima umum. (e) Memperkuat pengelolaan dan pengembangan.

1 **2.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

2.3.1 Definisi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1 Berdasarkan Peraturan raturan Pemerintah Pemerintah No, No/74 71 Tahun Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Pemerintah, 2014). Menurut KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintah), Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD (KSAP,2015). Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah pedoman wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka tercapainya transparansi dan akuntabilitas.

2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaL.

2.4.1 Definisi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaL.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud SAP Berbasis AkruaL adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akruaL, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

2.4.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaL

Reformasi proses akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akruaL, tidaklah mudah. Yang tidak kalah pentingnya adalah merubah pelaksana (SDM) yang familiar dengan kebijakan lama tidaklah mudah. Namun mengingat akuntansi basis akruaL merupakan suatu keharusan, agar informasi yang disajikan dapat disajikan secara transparan dan akuntabel. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaL diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Standar Akuntansi berbasis akruaL dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. Perubahan dari akuntansi berbasis

kas menuju akrual menjadi akrual penuh membawa pengaruh terhadap pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan T akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kegiatan. Dalam Akuntansi Pemerintah gambaran perkembangan operasi atau kegiatan. dibuat dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus atau Defisit. Dengan ditetapkannya PP No. 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah memiliki landasan hukum. Terbitnya Permendagri 64 Tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi berbasis akrual yang diterapkan mulai tahun 2015. Yang berarti bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk segera menerapkan SAP berbasis akrual. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tidak banyak berbeda, keberadaan pos piutang, Aset Tefap, Hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Perbedaan PP No. 71 Tahun 2010 dengan PP No. 24 Tahun 2005, terkait dengan komponen laporan keuangan,

tabel 2.1 Komponen Laporan Keuangan

PP No.24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju Akrual)	PP No.71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca	2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Arus Kas	3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas	4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	5. Laporan Operasional
	6. Laporan Perubahan Ekuitas
	7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber:olahan penulis

Penyajian Laporan Keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010,

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Unsur - unsurnya yaitu pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. TINGGI ILMU.

- 1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos sebagai berikut:
 - a. Saldo anggaran lebih awal
 - b. Penggunaan saldo anggaran lebih
 - c. Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan.
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
 - e. Dan lain-lain
 - f. Saldo anggran lebih akhir
3. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset non lancar serta kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos asset dan kewajiban yang mencakup jumlah – jumlah yang diterima atau dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris
5. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/deficit dari kegiatan Non Operasional bila ada, Pos luar biasa bila ada, Surplus/deficit-LO. Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkan, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan perubahan

Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1 PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah

1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa
3. Pihak yang member dan berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman
4. Pemerintah (Niu, 2015)

1 2.4.3 Kendala Penerapan SAP Berbasis Akruwal dalam PP 71 Th 2010

Kendala penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu sebagai berikut:

1. Kompleksitas laporan keuangan. Laporan yang harus disiapkan oleh pemerintah menjadi bertambah yaitu enam laporan dan satu CALK tanpa membedakan laporan pokok dan laporan pendukung. Hal tersebut dapat berdampak pada perubahan sistem akuntansi pemerintah yang pada akhirnya akan membuat alokasi anggaran menjadi cukup besar.
2. Kondisi pemerintah. Kondisi pemerintah meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan SAP berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2015 yang belum sepenuhnya sesuai dengan PP tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya laporan keuangan yang mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Dampak penerapan SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual dapat berdampak pada waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan, serta dapat berpengaruh pada jangka waktu pemeriksaan BPK RI mengingat laporan yang harus disiapkan lebih banyak dibandingkan dengan SAP sebelumnya sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005.
4. Kondisi pengendalian internal pemerintah yang belum memadai.

1
2.5 Peranan Sumber Daya Manusia dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual,

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/organisasi. Ada beberapa definisi yang digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Nawawi dalam Aldiani (2010) ada tiga pengertian tentang sumber daya manusia,

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi
2. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal didalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi
3. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

Penerapan SAP berbasis akrual yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetenst. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan SDM yang handal serta memahami masalah penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi SAP. Kompetensi SDM yang lemah dapat mengakibatkan kesalahan dalam memahami dan melaksanakan metode, teknik dan ketentuan yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintah, sehingga laporan keuangan yang dibuat juga akan salah dan terlambat penyampaiannya.

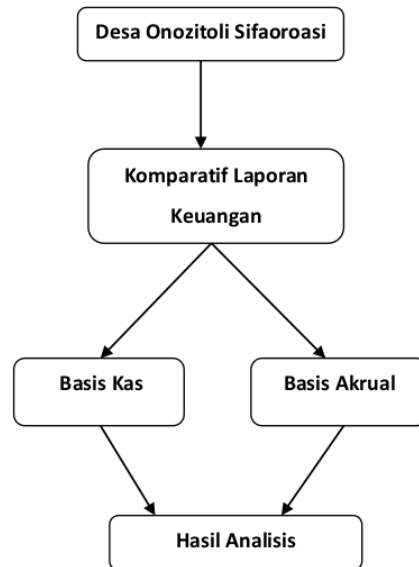
7
2.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5.1 penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	Friska ¹⁸ Langelo&David Paul Elia Saerang Sam Universitas Sam Ratulangi Manado(2015)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung	Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (Cash Toward Acrual) dan/atau Berbasis Kas Menuju Akrual. ²²
2.	Sony Lamonisi Universitas Sam Ratulangi Manado (2016)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon	Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas berbuah menjadi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015.
3.	Nursakilah	Analisis Penerapan	Penerapan SAP berbasis akrual

	Lubis&Nurlaila Nurlaila Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2022)	²¹ Akuntansi Berbasis Akrual pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal	²¹ pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal digolongkan dalam tahap persiapan menuju kepatuhan terhadap peraturan ¹⁸ perintah.
4	¹⁹ Anastasya A. Lasabuda& Jenny Morasa & Victorina Z. Tirayoh S ¹⁹ Ratulangi University(2020)	Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Berbasis Akrual atas penyajian laporan keuangan mempunyai perubahan yang signifikan terkait dampak positif.

2.6 kerangka pemikiran



BAB III PEMBAHASAN

39 3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Onozitoli Sifaoroasi terletak di kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat desa ini mayoritas bekerja sebagai petani, dengan hasil pertanian utama berupa kelapa, karet, dan berbagai tanaman pangan lainnya. Desa ini masih memiliki tradisi dan adat istiadat yang masih terjaga. Akses ke desa ini cukup terbatas, dengan infrastruktur jalan yang masih dalam pengembangan, sehingga menjadikannya lokasi yang relatif terpencil namun penuh dengan kekayaan budaya dan alam yang belum banyak tersentuh.

Kantor Desa Onozitoli Sifaoroasi adalah pusat administrasi pemerintahan desa yang melayani masyarakat setempat dalam berbagai urusan dan kebutuhan administratif. Kantor ini terletak di tengah-tengah desa, sehingga mudah diakses oleh seluruh warga desa. Bangunan kantor desa biasanya sederhana, namun fungsional, dengan ruang-ruang yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti ruang kepala desa, ruang rapat, dan ruang pelayanan masyarakat.

Di kantor desa ini, berbagai layanan disediakan, termasuk pengurusan surat menyurat seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan domisili, dan surat-surat lain yang diperlukan oleh warga. Selain itu, kantor desa juga berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh-tokoh masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Kantor desa ini juga menjadi pusat koordinasi bagi berbagai program dan kegiatan desa, baik yang bersifat pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Misalnya, program-program pertanian, kegiatan gotong royong, hingga penyelenggaraan acara adat sering kali dikoordinasikan melalui kantor desa ini. Kepala desa beserta perangkatnya bertugas memastikan bahwa seluruh program desa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

3.1.2 Sejarah Singkat Terbentuknya Desa Onozitoli Sifaoroasi

Sejarah singkat desa onozitoli sifaoroasi merupakan sebuah wilayah yang berada dikecamatan Gunungsitoli. Dan menurut beberapa tokoh masyarakat desa onozitoli sifaoroasi awalnya bernama "HILI ONOZITOLI", nama tersebut berdasarkan letak geografis yang berupa gunung dan dalam istilah Harafia HILI ONOZITOLI diartikan sebagai hili siteoli.

Seiring semakin padatnya penduduk hili onozitoli, maka beberapa masyarakat desa memperluas wilayahnya dan bermukim disebuah wilayah bersebelahan dengan onozitoli yang namanya sifaoroasi. Sehingga saat ini dinamakan desa onozitoli sifaoroasi, kemudian kepala kampung desa onozitoli sifaoroasi yang masih di ingat sampai ini yang pertama yaitu **Sarao Telaumbanua** dalam panggilan mbalugu lai mbaluo. Pada tahun 1970 perkiraan pemerintahan desa dipegang oleh kepala desa atas nama **FATOLOSA LASE** dan dia berasal dari unsur tentara, dan sejarah singkat tentang desa onozitoli sifaoroasi. Kemudian tentang perkembangan hingga saat ini desa onozitoli sifaoroasi sekarang ditambah dengan penduduk yang begitu banyak kurang lebih 2159 yang terdata di Dinas Kependudukan.

Demikian juga mata pencaharian penduduknya semuanya beralih dari pertanian, perkebunan dan bahkan sekarang lahan pertanian berkurang mereka bekerja sebagai buruh harian lepas. Dan itulah sejarah singkat perkembangan desa onozitoli hingga saat ini. Perkembangan desa onozitoli sifaoroasi dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang dimana jumlah kelahiran lebih banyak di bandingkan jumlah kematian. Ditambah lagi dengan perpindahan dan mutasi penduduk, sebagian besar berpindah dan sebagian juga masuk ke desa onozitoli sifaoroasi sehingga perkembangan dari tahun ke tahun tetap naik.

26 Masalah keuangan desa telah diatur didalan peraturan Permendagri nomor 46 tahun 2016 bahwa kepala desa atau pemerintahan desa berkewajiban memberikan informasi kepada warga masyarakat secara transparan baik pertanggungjawaban keuangan yang dimana 2 tempat papan informasi tentang laporan keuangan desa pertanggungjawaban 2023.

4 3.1.3 Visi Misi Desa Onozitoli Sifaoroasi

Visi :

Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan desa Onozitoli Sifaoroasi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Onozitoli Sifaoroasi seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya.

Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas visi desa Onozitoli Sifaoroasi adalah :

1. Sehat (Jasmani dan Rohani)
2. Nyaman dan Tentram
3. Berbudaya dan Berkarakter
4. Sejahtera
5. Maju

Misi :

Untuk Menmpertanggungjawabkan Visi di atas diperlukan upaya melalui kegiatan yang dirumuskan dalam misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan serta menguatkan fungsi dan kinerja pemerintah desa Onozitoli Sifaoroasi secara efektif dan efisien yang berbasis pada pelayanan masyarakat yang adil dan merata berlandaskan takut akan Tuhan.
2. Mengintegrasikan fungsi antar lembaga yang ada di desa Onozitoli Sifaoroasi secara harmonis dan berkesinambungan.
3. Menselaraskan program pembangunan desa Onozitoli Sifaoroasi dengan program pemerintah pusat maupun daerah.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan desa Onozitoli Sifaoroasi dengan mengoptimalkan 71 pemanfaatan sumber daya yang ada, dan memaksimalkan penggunaan dana desa yang bersifat Swakelola masyarakat serta menguatkan kegiatan usaha masyarakat melalui badan usaha Milik Desa (BUM Des).

3.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Onozitoli



3.1.5 Tugas Dan Tanggungjawab Pemerintahan Desa

1. Kepala desa, sebagai pemimpin utama, bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengelola semua aspek pemerintahan desa, termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik.
2. Kasi Pemerintahan, di bawah kepala desa, fokus pada urusan administratif dan hukum, termasuk pelaksanaan peraturan desa dan pengawasan kegiatan pemerintahan.
3. kasi Kesejahteraan bertugas memastikan program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat berjalan efektif, termasuk bantuan sosial dan kesehatan.
4. Kasi Pelayanan bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik sehari-hari, seperti administrasi kependudukan dan pelayanan masyarakat.
5. Sekretaris Desa mengelola administrasi internal desa, menyusun laporan, dan mendukung kepala desa dalam tugas-tugas administratif.
6. Kaur Tata Usaha dan Umum mengelola dokumen, arsip, dan kebutuhan umum desa, serta mendukung kegiatan administrasi dan komunikasi.
7. Kaur Perencanaan bertugas menyusun rencana pembangunan dan mengawasi pelaksanaannya, memastikan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa.
8. Kaur Keuangan mengelola anggaran dan laporan ⁴⁰ keuangan desa, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.
9. Kepala Dusun, sebagai perwakilan kepala desa di tingkat dusun, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan di tingkat dusun, menyampaikan aspirasi masyarakat dusun kepada kepala desa, serta membantu dalam pelaksanaan program-program desa di wilayahnya.

3.2 Pembahasan

“Bagaimana Menganalisis Komparatif Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akruwal”?

Menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akruwal melibatkan perbandingan antara laporan yang disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dengan laporan yang mencatat transaksi pada saat terjadinya, terlepas dari penerimaan atau pembayaran kas. Langkah pertama dalam analisis ini adalah memahami perbedaan antara basis kas dan basis akruwal, di mana basis kas mencatat pendapatan dan beban hanya ketika kas benar-benar diterima atau dibayarkan, sementara basis akruwal mencatat transaksi pada saat pendapatan diperoleh atau kewajiban diakui. Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi item-item seperti piutang, utang, pendapatan diterima dimuka, dan beban dibayar dimuka yang membedakan kedua basis ini. Untuk melakukan analisis, laporan keuangan berbasis kas perlu disesuaikan ke basis akruwal dengan menambahkan piutang dan beban yang masih harus dibayar, serta menghapus pendapatan diterima dimuka dan beban dibayar dimuka. Analisis ini mencakup perbandingan antara komponen-komponen laporan keuangan berbasis kas ke komponen-komponen laporan keuangan berbasis akruwal.

Komponen laporan keuangan

PP No.24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju Akruwal)	PP No.71 Tahun 2010 (Basis Akruwal)
6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	8. Laporan Realisasi Anggaran
7. Neraca	9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
8. Laporan Arus Kas	10. Neraca
9. Laporan Perubahan Ekuitas	11. Laporan Arus Kas
10. Catatan Atas Laporan Keuangan	12. Laporan Operasional
	13. Laporan Perubahan Ekuitas
	14. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 2.2 komparatif laporan keuangan

komponen	Basis kas	Basis akruwal
Laporan realisasi anggaran (LRA)	Menampilkan pendapatan dan belanja ketika kas diterima atau dibayarkan	Menunjukkan pendapatan dan belanja sesuai anggaran namun tidak memperhitungkan piyang dan utang belum terjadi
Laporan perubahan saldo anggaran lebih(sal)	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajikan perubahan dalam saldo anggaran lebih(sal) yang dihasilkan surplusatau devisit anggran

neraca	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajikan posisi keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas.
Laporan operasional	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajikan seluruh pendapatan dan beban pemerintah dalam periode akuntansi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan.
Arus kas	Menyajikan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu.	Basis kas, tetapi sebagai pelengkap laporan berbasis akrual untuk menunjukkan perubahan kas
Laporan perubahan ekuitas	Tidak tersedia dalam basis kas	Menunjukkan perubahan ekuitas selama periode akuntansi, termasuk surplus atau defisit, koreksi, dan penyesuaian lainnya.
Catatan atas laporan keuangan	Terbatas atas informasi kas yang relevan.	Menyajikan penjelasan rinci tentang kebijakan akuntansi, estimasi penting, serta penjelasan tambahan terkait item dalam laporan keuangan dalam berbasis akrual

Laporan keuangan berbasis kas dan berbasis akrual pada pemerintah memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal pencatatan dan pelaporan. Pada basis kas, laporan yang disajikan lebih terbatas hanya mencakup Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, di mana pendapatan diakui saat kas diterima, dan belanja diakui saat kas dibayarkan. Tidak ada laporan yang mencerminkan posisi keuangan atau operasional secara keseluruhan, seperti neraca atau laporan operasional, karena basis kas tidak mencatat piutang, utang, atau aset tetap.

Sebaliknya, laporan keuangan berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keuangan pemerintah. Basis akrual tidak hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran tetapi juga memperkenalkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menunjukkan perubahan surplus atau defisit anggaran. Neraca menjadi komponen utama dalam basis akrual, menggambarkan posisi keuangan pemerintah dengan mencatat seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Selain itu, Laporan Operasional

mencakup seluruh pendapatan dan beban, tidak tergantung pada penerimaan atau pembayaran kas, yang memberikan wawasan tentang kinerja operasional pemerintah selama periode tertentu.

Laporan Arus Kas dalam basis akrual tetap relevan dan disajikan untuk melengkapi laporan keuangan lainnya dengan menunjukkan perubahan kas selama periode. Laporan Perubahan Ekuitas juga diperkenalkan untuk mengungkapkan perubahan ekuitas pemerintah yang tidak hanya berasal dari surplus atau defisit, tetapi juga penyesuaian lainnya yang mempengaruhi ekuitas secara langsung. Catatan atas Laporan Keuangan dalam basis akrual memberikan informasi yang lebih rinci dan penjelasan tambahan terkait kebijakan akuntansi dan estimasi penting, yang tidak ditemukan dalam basis kas.

Laporan realisasi anggaran (LRA)

LRA dalam laporan keuangan berbasis CTA dan laporan keuangan berbasis akrual tidak memiliki perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan SAP. LRA disajikan dalam basis kas, baik dalam laporan keuangan berbasis CTA maupun laporan keuangan berbasis akrual. Perbedaan-perbedaan yang ada pada LRA dari kedua laporan keuangan tersebut terdapat pada jenis-jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tertentu yang tidak selalu sama setiap tahunnya. Perbedaan tersebut terdiri dari: 1. Pendapatan transfer berupa bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya yang hanya terdapat pada LRA tahun 2015, serta lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan hibah yang hanya terdapat pada LRA 2014. 2. Perbedaan jenis belanja, yaitu belanja operasional berupa belanja bantuan keuangan yang hanya terdapat pada LRA tahun 2014. 3. Perbedaan transfer berupa transfer bantuan keuangan lainnya yang hanya terdapat 18 pada LRA tahun 2015

Laporan Perubahan SAL

Laporan perubahan SAL hanya disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual. Laporan perubahan SAL disusun dalam basis kas, namun tidak disajikan dalam laporan keuangan berbasis CTA. Akun SAL muncul dalam laporan keuangan berbasis akrual sebagai akun lawan dari pendapatan-LRA dan belanja. Sementara dalam basis CTA, pendapatan dan belanja langsung ditandingkan dengan kas, sehingga akun SAL tidak pernah ada. Laporan perubahan SAL menyajikan SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, SiLPA/SiKPA, koreksi pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan SAL akhir.

2

Neraca

Basis akrual dan basis CTA sama-sama menggunakan basis akrual dalam pengakuan, pengukuran, dan pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas. Oleh karena itu, informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang tersaji dalam neraca berbasis akrual sama/hampir sama dengan neraca berbasis CTA. Perbedaan yang terjadi hanya berupa pengklasifikasian dan jenis-jenis akun yang disajikan, misalnya dalam neraca berbasis CTA akan disajikan akun-akun yang berasal dari jurnal kolorari untuk mengakui aset dan kewajiban secara akrual. Perbedaan informasi keuangan yang ditemukan antara neraca berbasis akrual dengan neraca berbasis CTA antara lain:

1. Neraca berbasis akrual menyajikan informasi tentang akun-akun deferal. Neraca berbasis akrual menyajikan informasi mengenai pendapatan/beban yang diterima/dibayar di muka (deferal) dengan pendekatan aset/kewajiban. Pencatatan ini tidak ditemukan dalam neraca berbasis CTA, karena basis CTA mengakui pendapatan dan beban/belanja dalam basis kas, sehingga pendapatan yang diterima di muka dan beban/belanja yang dibayar di muka akan langsung diakui dan dicatat saat kas atau setara kas diterima/dibayarkan. Dampak dari perbedaan ini adalah, neraca berbasis akrual dapat memberikan informasi tentang nilai barang/jasa yang masih harus diterima/yang menjadi kewajiban untuk disediakan di masa depan sehubungan dengan kas yang telah dibayarkan/diterima di muka.
2. Neraca berbasis akrual menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban yang ditangguhkan (akrual). Informasi ini ditunjukkan dalam akun piutang pendapatan dan utang beban, misalnya piutang pajak, piutang retribusi, utang bunga, dan lainlain. Neraca berbasis CTA juga mencatat piutang untuk mengakui potensi pendapatan yang akan diterima yang telah didukung oleh dokumen yang sah, 21 misalnya surat ketetapan pajak, namun kas/setara kas belum diterima. Atas transaksi ini, dilakukan pencatatan piutang dan cadangan piutang (bukan pendapatan). Sedangkan untuk beban yang ditangguhkan, neraca berbasis CTA hanya melakukan pencatatan atas utang bunga, dan tidak mengakui/mencatat beban akrual lainnya, misalnya utang beban. Dampak dari perbedaan ini adalah, neraca berbasis akrual dapat memberikan informasi tentang nilai pendapatan/beban yang terutang yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan/beban, namun kas/setara kas belum diterima/dibayarkan.
3. Neraca berbasis akrual menyajikan informasi mengenai akumulasi penyusutan aset tetap. Dalam basis akrual, penyusutan aset tetap dicatat

sebagai beban penyusutan yang dilaporkan dalam LO dan akumulasi beban penyusutan yang dilaporkan dalam neraca. Dalam basis CTA, transaksi-transaksi yang berhubungan dengan aset tetap, misalnya pembelian, penjualan, dan penyusutan aset tetap dicatat dalam akun aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Informasi tentang aset tetap yang disajikan dalam neraca berbasis CTA kurang lengkap karena hanya menunjukkan nilai bersih aset tetap pada tanggal pelaporan, tanpa menunjukkan penyusutan aset tetap yang telah dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan. Dampak dari perbedaan ini adalah, neraca berbasis akrual dapat memberikan informasi tentang nilai yang telah disusutkan dari aset tetap, sejak mulai digunakan sampai dengan tanggal pelaporan.

4. Neraca berbasis akrual menyajikan ekuitas yang menunjukkan nilai kekayaan bersih pemerintah yang terbentuk dari akun-akun pembentuk ekuitas dalam basis akrual, yaitu surplus/defisit LO, serta kenaikan/penurunan ekuitas dari koreksi-koreksi mendasar. Sementara itu, ekuitas dana dalam neraca berbasis CTA tidak sepenuhnya menunjukkan penyajian ekuitas dalam basis akrual. Ekuitas dana hanya berisi akun-akun yang muncul karena adanya jurnal kolorari untuk membantu mengakui dan mencatat aset dan kewajiban secara akrual. Selain itu, ekuitas dana juga memuat SiLPA/SiKPA yang dihitung dalam basis kas. Ekuitas dana dalam neraca berbasis CTA hanya digunakan untuk menyamakan sisi aktiva dan pasiva, dan tidak benar-benar menunjukkan kekayaan bersih pemerintah. Dampak dari perbedaan ini adalah, neraca berbasis akrual menyajikan nilai ekuitas yang menunjukkan nilai kekayaan bersih pemerintah yang sebenarnya yang rinciannya tersaji dalam LPE

LAPORAN OPERASIONAL(LO)

LO hanya disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual. Dalam basis CTA, entitas pelaporan diperbolehkan menyusun laporan kinerja keuangan yang menyajikan pendapatan, beban, dan surplus/defisit dalam basis akrual. Akan tetapi, laporan kinerja keuangan ini bersifat tidak wajib. LO menyajikan pendapatan, beban, dan surplus/defisit dalam basis akrual, tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima/dikeluarkan. LO menyajikan pendapatanLO, beban, surplus/defisit dari aktivitas operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos-pos luar biasa, dan surplus/defisit LO. Komponen pendapatan dalam LO hampir sama dengan

komponen pendapatan dalam LRA. Hanya saja, pendapatan-LO disajikan dalam basis akrual, sedangkan pendapatan-LRA disajikan dalam basis kas. Beban dalam LO disajikan dalam basis akrual. Dengan basis akrual, LO menyajikan komponen beban-beban yang tidak ada di dalam basis kas. Beban-beban tersebut antara lain:

1. Beban persediaan yang menunjukkan nilai persediaan yang telah digunakan/telah usang (bukan nilai persediaan yang dibeli) dalam satu periode pelaporan. Beban persediaan muncul setelah dilakukan penyesuaian antara nilai persediaan yang dimiliki selama satu periode dikurangi sisa persediaan pada akhir periode. Dampak dari penyajian akun beban persediaan adalah, LO dapat memberikan informasi tentang berapa nilai persediaan yang telah digunakan/usang dalam satu periode pelaporan. Selain itu, beban persediaan memiliki hubungan dengan nilai persediaan 19 yang tersaji dalam neraca berbasis akrual pada tanggal pelaporan, sehingga mendukung keandalan nilai persediaan yang tersaji dalam neraca tersebut.
2. Beban penyusutan aset tetap yang menunjukkan penyusutan atas nilai aset tetap selama masa manfaat aset tetap tersebut. Beban penyusutan tidak muncul dalam basis CTA. Dalam basis CTA, penyusutan aset tetap dicatat langsung sebagai pengurang nilai aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Dampak dari penyajian beban penyusutan adalah, LO dapat memberikan informasi tentang berapa nilai yang disusutkan dari suatu aset tetap selama satu periode pelaporan
3. Beban penyisihan piutang tak tertagih yang menunjukkan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Dalam basis CTA, beban penyisihan piutang dicatat langsung sebagai pengurang piutang dan cadangan piutang. Dampak dari penyajian beban penyisihan piutang tak tertagih adalah, LO dapat memberikan informasi tentang nilai piutang yang tidak tertagih/dihapuskan selama satu periode akuntansi karena tidak dapat diharapkan ketertagihannya. LO menyajikan surplus/defisit dari aktivitas non operasional yang terdiri dari surplus/defisit penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang. LO juga menyajikan surplus/defisit dari pos-pos luar biasa yang terdiri dari pendapatan dan beban luar biasa.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS(LPE)

LPE hanya disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual. LPE menyajikan kenaikan/penurunan ekuitas selama satu periode pelaporan. LPE memiliki hubungan dengan LO dan neraca. LPE memuat nilai surplus/defisit LO sebagai penambah/pengurang ekuitas, dan menyajikan saldo akhir ekuitas yang akan disajikan ke dalam neraca. LPE pemerintah Kota Batu tahun 2015 menyajikan ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi mendasar yang langsung mempengaruhi ekuitas, dan ekuitas akhir.

LAPORAN ARUS KAS(LAK)

LAK dalam laporan keuangan berbasis CTA dan laporan keuangan berbasis akrual tidak memiliki perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan SAP. LAK disajikan dalam basis kas, baik dalam laporan keuangan berbasis CTA maupun laporan keuangan berbasis akrual. Perbedaan-perbedaan yang ada pada LAK dari kedua laporan keuangan tersebut 20 terdapat pada jenis/sumber penerimaan kas dan jenis pengeluaran kas yang tidak selalu sama setiap tahunnya. LAK menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas dari aktivitas transitoris, kenaikan/penurunan bersih kas selama satu periode pelaporan, saldo awal kas di BUD, saldo akhir kas di BUD, saldo awal kas di Bendahara Kapitasi JKN, saldo akhir kas di Bendahara Kapitasi JKN, dan saldo akhir kas.

12 KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Lebih/(kuran g) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan asli	1.702.350,00	1.702.350,00	0.00
4.1.1.	desa			
4.2.	Hasil usaha desa	1.702.350,00	1.702.350,00	0.00
4.2.1.	Pendapatan transfer	1.287.033.375,00	1.287.033.375,0	0.00
4.2.2.			0	
	Dana desa	7.604.000.00.00	7.604.000.00.00	0.00
4.2.3.	Bagi hasil pajak dan retribusi	29.964.285.00	29.964.285.00	0.00.
4.3.	Alokasi dana desa	469.465.090.00	469.465.090.00	0.00
4.3.6.	Pendapatan lain lain	0.00	1.517.261,00	(1.517.261,00)

	Bunga bank	0.00	1.517.261.00	(1.517.261.00)
5	JUMLAH PENDAPATAN	1.288.735.725.00	1.290.252.986.00	(1.517.261.00)
5.1.	BELANJA			
5.1.1.	Belanja pegawai	327.496.360.00	327.496.360.00	0.00
5.1.1.1.	28 Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	29.119.680.00	29.119.680.00	0.00
5.1.1.2.	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	229.025.620.00	229.025.620.00	0.00
5.1.1.3.	20 Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	4.191.060.00	4.191.060.00	0.00
5.1.1.4.	Tunjangan BPD	65.160.000.00	65.160.000.00	0.00
5.2.	Belanja barang dan jasa	515.244.139.00	501.402.749.00	13.841.390.00
5.2.1.	Belanja barang pelengkapan	159.888.639.00	148.193.797.00	11.394.842.00
5.2.1.1.	10 Belanja jasa honorarium	104.750.000.00	102.050.000.00	2.700.000.00
5.2.1.2.	Belanja perjalanan dinas	41.000.000.00	41.000.000.00	0.00
5.2.1.3.	26 Belanja operasional	4.657.000.00	4.960.452.00	(303.452.00)
5.2.1.5.	26 Belanja pemeliharaan	21.268.000.00	21.268.000.00	0.00
5.2.1.6.	10 Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada	183.680.500.00	183.680.500.00	50.000.00
5.3.	Belanja modal	254.021.560.00	254.021.560.00	0.00
5.3.1.	29 Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat	24.1000.000.00	24.1000.000.00	0.00
5.3.1.7.	Belanja modal irigasi/embung/drainasee/air limbah	229.912.560.00	229.912.560.00	0.00
5.4.	Belanja tidak terduga	202.518.100.00	194.400.000.00	8.118.100.00
5.4.1.	Belanja tidak terduga	202.518.100.00	194.400.000.00	8.118.100.00
	Jumlah belanja	1.299.271.159.00	1.227.311.669.00	21.959.490.00

			0	
6	Surplus/(devisit)	(10.535.434.00)	12.941.317.00	(23.476.751.00)
6.1.	Pembiayaan			
	Penerimaan	10.535.434.00	10.535.434.00	00
6.1.1.	pembiayaan			
	SILPA tahun sebelumnya	10.535.434.00	10.535.434.00	00
	PEMBIAYAAN	10.535.434.00	10.535.434.00	00
	NETTC			

12	KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURAN) (Rp)
1	2	3	4	5	
	20	Sisa lebih pembiayaan anggaran	0.00	23.476.751.00	(23.476.751.00)

Dalam menganalisis laporan keuangan berbasis kas menuju akrual, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan berdasarkan data yang disajikan. Secara keseluruhan, laporan keuangan menunjukkan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp1.290.252.986,00 melebihi anggaran yang direncanakan sebesar Rp1.288.735.725,00 dengan selisih sebesar Rp1.517.261,00. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pendapatan lain-lain dan bunga bank yang tidak direncanakan, yang menambah total pendapatan.

Di sisi belanja, realisasi belanja sebesar Rp1.227.311.669,00 juga lebih rendah dibandingkan anggaran Rp1.299.271.159,00, menghasilkan surplus belanja sebesar Rp21.959.490,00. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam komponen belanja barang dan jasa, terutama pada belanja operasional perkantoran yang mengalami kekurangan realisasi sebesar Rp303.452,00 dan belanja barang pelengkapan yang surplus sebesar Rp11.394.842,00.

Surplus anggaran di laporan kas menunjukkan bahwa setelah belanja, terdapat selisih surplus Rp12.941.317,00, sementara akumulasi SILPA tahun sebelumnya menunjukkan saldo yang positif sebesar Rp10.535.434,00. Sehingga, total surplus pembiayaan adalah Rp10.535.434,00, meskipun ada selisih

signifikan dalam laporan realisasi yang menunjukkan surplus yang lebih besar sebesar Rp23.476.751,00.

Perubahan dari basis kas ke akrual akan memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang posisi keuangan desa, karena basis akrual mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa catatan akuntansi yang lebih detail untuk mencerminkan pengakuan pendapatan yang mungkin belum direalisasikan dalam laporan kas. Penerapan basis akrual akan membantu dalam memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan dan aliran dana desa secara keseluruhan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan dari laporan keuangan berbasis kas ke berbasis akrual memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan desa. Laporan berbasis kas, meskipun sederhana dan mudah dipahami, hanya mencatat transaksi pada saat kas diterima atau dibayar, sehingga sering kali tidak mencerminkan kewajiban dan pendapatan yang belum terealisasi. Sebaliknya, laporan berbasis akrual mengakui pendapatan dan beban saat transaksi terjadi, memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kesehatan finansial desa dengan mencatat semua hak dan kewajiban yang ada. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa laporan berbasis kas menunjukkan surplus yang tampak lebih tinggi, sementara laporan berbasis akrual mengungkapkan adanya pendapatan yang masih harus diterima dan kewajiban yang belum dibayar, yang menyesuaikan perspektif keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peralihan laporan berbasis akrual di desa akan meningkatkan transparansi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses transisi ke akrual harus dilakukan secara bertahap dengan pelatihan dan penyesuaian sistem yang memadai untuk memastikan manfaat maksimal dari perubahan ini.

4.2 SARAN

Saran untuk Desa: Meningkatkan pengelolaan keuangan dan transparansi, desa disarankan untuk mulai mempertimbangkan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Penerapan ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk pelatihan bagi staf keuangan dan penyesuaian sistem akuntansi yang ada. Desa sebaiknya melakukan uji coba atau fase peralihan bertahap untuk memahami tantangan dan manfaat dari sistem akrual secara praktis. Penilaian berkala selama fase transisi akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi kendala serta memastikan bahwa sistem baru dapat berfungsi dengan baik dan memberikan informasi keuangan yang lebih akurat.

Saran untuk Peneliti Selanjutnya: Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan studi mendalam mengenai dampak praktis dari penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di desa-desa yang telah menggunakannya. Penelitian lebih lanjut dapat mencakup analisis cost-benefit dari implementasi akrual, serta identifikasi tantangan operasional yang dihadapi oleh desa selama transisi. Studi

kasus di berbagai desa dengan karakteristik berbeda juga akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang efektivitas dan adaptasi sistem akrual. Penelitian ini sebaiknya melibatkan pemangku kepentingan desa, seperti aparat desa dan masyarakat, untuk mendapatkan perspektif yang holistik mengenai perubahan ini dan untuk mengembangkan rekomendasi yang aplikatif dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Adi Bagus Prasetio, Roni Andespa, Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan Kata Pengantar. 2020. "Tugas Akhir Tugas Akhir." *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2012* (1): 41–49.
- GOOD, GOOLMAN. 2015. "濟無No Title No Title No Title." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1 (April): 10–22.
- Indonesia, Undang-undang Republik. 2014. "https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm 1/44."
- Putri, S E. 2019. "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura." <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/6563%0Ahttps://repository.uir.ac.id/6563/1/155310267.pdf>.
- Tulangow, Andre P., dan VentjeTreesje Runtu Ilat. 2014. "Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2 (4): 278–88.

ANALISIS KOMPARATIF LAPORAN KEUANGAN BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DI DESA ONOZITOLI SIFAOROASI KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNG SITOLI

ORIGINALITY REPORT

61%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	eprints.perbanas.ac.id Internet	1778 words — 22%
2	jimfeb.ub.ac.id Internet	1386 words — 17%
3	repository.uir.ac.id Internet	582 words — 7%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet	78 words — 1%
5	repository.ub.ac.id Internet	68 words — 1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet	60 words — 1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	50 words — 1%
8	123dok.com Internet	43 words — 1%

9	Lisman Harefa. "PENERAPAN SAK ETAP PADA KOPERASI DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Koperasi Konsumen Tokosa Sahabat Sejati Gunungsitoli)", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2023 Crossref	43 words — 1%
10	sumberdadi-trenggalek.trenggalekkab.go.id Internet	39 words — < 1%
11	ejournal.unikama.ac.id Internet	37 words — < 1%
12	mangli.kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id Internet	37 words — < 1%
13	qdoc.tips Internet	37 words — < 1%
14	www.researchgate.net Internet	33 words — < 1%
15	www.scribd.com Internet	32 words — < 1%
16	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	31 words — < 1%
17	perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id Internet	30 words — < 1%
18	ejournal.unsrat.ac.id Internet	29 words — < 1%
19	etheses.uin-malang.ac.id Internet	28 words — < 1%

20	jdih.pemalangkab.go.id Internet	28 words — < 1%
21	Nursakilah Lubis, Nurlaila Nurlaila. "Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022 Crossref	27 words — < 1%
22	www.neliti.com Internet	26 words — < 1%
23	id.scribd.com Internet	24 words — < 1%
24	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	24 words — < 1%
25	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	21 words — < 1%
26	sumberharjo.kabpacitan.id Internet	21 words — < 1%
27	docplayer.info Internet	17 words — < 1%
28	kemanukan-bagelen.purworejokab.go.id Internet	17 words — < 1%
29	www.cangkuangkulon.desa.id Internet	15 words — < 1%
30	e-journal.uajy.ac.id Internet	13 words — < 1%

31	Internet	13 words — < 1%
32	mybloogadress.blogspot.com Internet	12 words — < 1%
33	repository.radenintan.ac.id Internet	12 words — < 1%
34	repository.ubharajaya.ac.id Internet	12 words — < 1%
35	Ajie W. Soejono. "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN KEL. KARANGWARU, KEC. TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA", Respati, 2017 Crossref	11 words — < 1%
36	Efi Miftah Faridli, Bambang Sumardjoko, Harun Joko Prayitno, Sabar Narimo. "Rekonstruksi kepemimpinan pendidikan progresif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran: teori dan praktik", Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2024 Crossref	11 words — < 1%
37	denpasarkota.go.id Internet	11 words — < 1%
38	Winston - Pontoh. "Goodwill No. 1 Vol. 4 Juni 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2013 Crossref	10 words — < 1%
39	ejurnal.undana.ac.id Internet	10 words — < 1%
40	journal.epistemikpress.id Internet	

10 words — < 1%

41 pt.scribd.com
Internet

10 words — < 1%

42 repositori.uma.ac.id
Internet

10 words — < 1%

43 suherminasep.blogspot.com
Internet

10 words — < 1%

44 , , Fitri Lailatul Badria. "EFEKTIFITAS RETRIBUSI PEDAGANG DI PASAR SUMBERGEMPOL", Open Science Framework, 2021
Publications

9 words — < 1%

45 doc-pak.undip.ac.id
Internet

9 words — < 1%

46 eprints.uny.ac.id
Internet

9 words — < 1%

47 jurnal.ugm.ac.id
Internet

9 words — < 1%

48 media.neliti.com
Internet

9 words — < 1%

49 pdfcoffee.com
Internet

9 words — < 1%

50 repositori.usu.ac.id
Internet

9 words — < 1%

51 repository.unisma.ac.id
Internet

9 words — < 1%

52 M SRIASTUTI AGUSTINA. "PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA", Jurnal YUSTITIABELEN, 2020
Crossref 8 words — < 1%

53 Maemunah Maemunah. "Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima)", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019
Crossref 8 words — < 1%

54 dspace.uii.ac.id
Internet 8 words — < 1%

55 ecampus.poltekkes-medan.ac.id
Internet 8 words — < 1%

56 es.scribd.com
Internet 8 words — < 1%

57 gorontalo.bpk.go.id
Internet 8 words — < 1%

58 journal.unismuh.ac.id
Internet 8 words — < 1%

59 jurnal.polines.ac.id
Internet 8 words — < 1%

60 lipsus.kompas.com
Internet 8 words — < 1%

61 repo.iainbatusangkar.ac.id
Internet 8 words — < 1%

62	repository.uinsu.ac.id Internet	8 words — < 1%
63	repository.unmuha.ac.id:8080 Internet	8 words — < 1%
64	repository.widyakartika.ac.id Internet	8 words — < 1%
65	text-id.123dok.com Internet	8 words — < 1%
66	www.hashmicro.com Internet	8 words — < 1%
67	xjnineherryblog.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
68	eprints.undip.ac.id Internet	7 words — < 1%
69	danielstephanus.wordpress.com Internet	6 words — < 1%
70	eprints.ukmc.ac.id Internet	6 words — < 1%
71	eprints.umg.ac.id Internet	6 words — < 1%
72	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet	6 words — < 1%
73	repository.syekhnurjati.ac.id Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF